



LAPORAN KINERJA

2019

BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Laporan Kinerja Biro KSAP 2019



Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Sekretariat Jenderal DPR RI
2020
biro_ksap@dpr.go.id



Executive Summary

Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. Hal ini karena Biro KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen, namun juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi Diplomasi Parlemen.

Fungsi Diplomasi Parlemen tidak hanya menjadi *second track diplomacy* di Indonesia, namun telah berkembang menjadi *first track diplomacy*, yang sama pentingnya dengan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena Diplomasi yang dilakukan oleh Parlemen lebih fleksible dibandingkan dengan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dirasakan lebih kaku.

Tahun 2019 merupakan tahun akhir Periode Keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019. Banyak capaian yang telah diraih Biro KSAP selama 5 tahun memberi dukungan teknis, administratif dan dukungan kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen pada khususnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada umumnya. Capaian Kinerja Biro KSAP sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2019 dengan program kegiatan meningkatnya Kualitas dukungan Diplomasi Parlemen memiliki Capaian 100% dan masing-masing indikator memiliki capaian kinerja yaitu Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang sesuai standar (nilai capaian kinerja 100%), Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai standar (nilai capaian kinerja 100%), Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang sesuai standar (nilai capaian 100%) dan Persentase dukungan kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar (nilai capaian kinerja 100%).

Adapun capaian kinerja keuangan Biro KSAP untuk Satker Dewan dengan Pagu Rp.106.559.712.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.89.196.771.454,00 atau setara dengan 83,71% dari pagu. Sedangkan capaian kinerja keuangan Satker Setjen dari Pagu sebesar Rp.4.396.680.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.3.767.280.400,00 atau 85,68% dari pagu. Capaian kinerja tersebut sudah baik namun tentunya masih akan terus ditingkatkan dimasa yang akan datang dengan melakukan upaya-upaya seperti akan lebih ketat dalam perencanaan keuangan, melakukan monitoring atas pelaksanaan anggaran per triwulaaan yang lebih intensif, penyusunan cash planning yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi real di lapangan.





Pada Periode keanggotaan 2019-2024, akan disusun rencana strategis diplomasi parlemen, yang tentunya akan dapat menjadi panduan kerja bagi Biro KSAP dalam memberikan dukungan kepada DPR dan BKSAP dalam mewujudkan dan mencapai tujuan dengan lebih optimal.

Biro KSAP juga akan menguatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian dan organisasi Internasional terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kedutaan Besar negara sahabat di Jakarta, organisasi internasional yang ada di Jakarta, untuk lebih mengoptimalkan peran masing-masing dalam turut mendukung diplomasi Parlemen DPR RI yang lebih baik, efektif dan berwibawa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan saling membantu dalam mencapai kinerja Biro KSAP yang lebih baik di tahun 2019 ini.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, Februari 2020

Kepala Biro KSAP

Endah TD Retnoastuti
NIP.196804021993022001



Contents

Executive Summary	1
Contents	3
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Bab I : Pendahuluan	7
A. Latar belakang	7
B. Dasar Hukum	8
C. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi	9
D. Mandat dan Peran Strategis	10
E. Program Reformasi Birokrasi	11
F. Sistematika Pelaporan	11
Bab II : Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13
B. Penetapan Kinerja 2019	13
Bab III: Akuntabilitas Kinerja	16
A. Pengukuran capaian kinerja	16
B. Evaluasi dan Analisis pencapaian kinerja	17
C. Akuntabilitas Keuangan	26
D. Kinerja lain-lain	29
Bab IV : Penutup	32
A. Kesimpulan	32
B. Rekomendasi	33
Lampiran :	
Perjanjian Kinerja Biro KSAP Tahun 2019	
Data Pegawai di Lingkungan Biro KSAP Tahun 2019	



Daftar Pengiriman Delegasi tahun 2019

Daftar dukungan kegiatan rapat-rapat courtesy call dan friendly talk tahun 2019

Laporan pelaksanaan zona integritas

Hasil Survey di Lingkungan Biro KSAP

Foto-foto Output kegiatan



Daftar Tabel

Tabel 1 : Perjanjian Kinerja BKSAP Tahun 2019	14
Tabel 2 : Matriks Perubahan Indikator Kinerja Biro KSAP Tahun 2015 – 2019	15
Tabel 3 : Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2019	16
Tabel 4 : Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Internasional dan output dukungan kegiatan Biro KSAP tahun 2015-2019	18
Tabel 5 : Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Regional dan output dukungan kegiatan Biro KSAP tahun 2015-2019	20
Tabel 6 : Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP dalam Kerjasama Bilateral dan output dukungan kegiatan Biro KSAP tahun 2015-2019	22
Tabel 7 : Jumlah rapat-rapat Courtesy call/Friendly talk tahun 2015 – 2019	23
Tabel 8 : Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP dalam kerjasama Diplomasi Perorangan dan output dukungan kegiatan Biro KSAP tahun 2015-2019	25
Tabel 9 : Output Kegiatan Penterjemahan Lisan dan Tertulis Tahun 2019	26
Tabel 10 : Pagu Anggaran BKSAP DPR RI Tahun 2019	27
Tabel 11 : Persandingan Realisasi Anggaran Satker Dewan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019	28
Tabel 12 : Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019	29



Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi Biro KSAP	10
Gambar 2 : Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Internasional Tahun 2015 – 2019	19
Gambar 3 : Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Regional Tahun 2015 – 2019	21
Gambar 4 : Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP dalam kerjasama Bilateral Tahun 2015 – 2019	22
Gambar 5 : Output dukungan Kegiatan rapat Courtesy call/Friendly talk	24
Gambar 6 : Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP dalam Kerjasama Diplomasi Perorangan Tahun 2015 – 2019	26
Gambar 7 : Persandingan realisasi anggaran Satker Dewan	29
Gambar 8 : Persandingan realisasi anggaran Satker Setjen	30



Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode tahun 2014-2019 melakukan penguatan kelembagaan dalam melaksanakan 3 fungsi utamanya yaitu legislatif, pengawasan dan anggaran, serta fungsi lainnya yaitu diplomasi parlemen. Untuk itu DPR telah menetapkan visi tahun 2014-2019 yaitu “menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah”. Pencapaian visi tersebut dapat terwujud apabila seluruh elemen baik Pimpinan dan Anggota DPR RI serta segenap pegawai dilingkungan Setjen dan BK DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda DPR RI.



Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya dengan optimal serta terwujudnya penguatan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga penyeimbang pemerintah, DPR RI harus didukung supporting system yang akuntabel dan berkualitas, salah satunya adalah Setjen DPR RI.

Hal lain yang merupakan penguatan didalam Undang-Undang MD3 adalah diplomasi parlemen sebagai salah satu fungsi Dewan. Diplomasi Parlemen dilakukan sesuai amanat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut aktif dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Diplomasi Parlemen sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh DPR RI. Diplomasi parlemen telah dilakukan jauh sewaktu Parlemen masih bernama Volkstraad. Salah satu contoh pelaksanaan diplomasi parlemen yang tercatat adalah keikutsertaan beberapa tokoh Indonesia di Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tahun 1922. Keikutsertaan Indonesia dalam Sidang tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia telah aktif dalam pergaulan dunia dan organisasi Internasional jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pada saat ini DPR RI melalui BKSAP DPR RI telah meraih banyak capaian penting dalam mendukung diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai *second track diplomacy*, DPR turut dalam pengambilan keputusan dan resolusi sebagai hasil dari pertemuan dan sidang baik di level bilateral, regional maupun internasional. Ketika menghadiri berbagai sidang baik regional maupun internasional, BKSAP menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dan juga memperjuangkan berbagai resolusi yang bermanfaat bagi orang banyak.

Pada bulan September 2015, para kepala pemerintahan menyepakati sebuah deklarasi berjudul “*Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development*”, suatu rangkaian agenda pembangunan yang global yang memiliki 17 tujuan dengan 169 target. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan mengenai pentingnya peran parlemen dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan berkelanjutan tersebut. Hal ini tentunya karena parlemen memiliki fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan, yang diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Para Periode keanggotaan 2015-2019, DPR RI telah membentuk 51 Group Kerja Sama Bilateral (GKSB). GKSB ini berupaya mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dengan Negara sahabat. Selama periode keanggotaan ini, telah dihasilkan 4 MoU yaitu dengan Fiji, Vanuatu, Mongolia dan Bahrain.

Pada Periode 2015-2019 juga mulai diadakan diplomasi individu yang dilakukan oleh DPR RI. Dengan pendekatan individu diharapkan dapat mengakomodir keinginan setiap Anggota Dewan yang ingin melakukan diplomasi individu. Selain itu, diplomasi individu memperluas pergaulan dan kerjasama Anggota DPR RI dengan Anggota parlemen negara sahabat. Diplomasi individu juga dapat menyelesaikan beberapa masalah dengan pendekatan personal.

Keberhasilan DPR RI dalam hal ini BKSAP DPR RI sebagai *second track diplomacy* yang melakukan multi track diplomacy, tentu saja tidak terlepas dari dukungan Setjen DPR RI di Biro KSAP dalam memberikan dukungan teknis, administratif maupun keahlian kepada BKSAP DPR RI. Bagi Biro KSAP, dimasukkannya fungsi diplomasi parlemen dalam Perubahan Undang-Undang tentang MD3 menunjukkan pentingnya diplomasi parlemen dalam mendukung kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi Biro KSAP untuk meningkatkan pelayanan kepada Dewan dalam diplomasi parlemen.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Biro KSAP dibuat sebagai implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerja Sama Antar Parlemen tahun 2018 adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019 dan sebagai evaluasi untuk perbaikan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Biro KSAP disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/Per-Sekjen/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 3/PERSEKJEN/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan Sekjen Nomor 7 Tahun 2018, Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi :

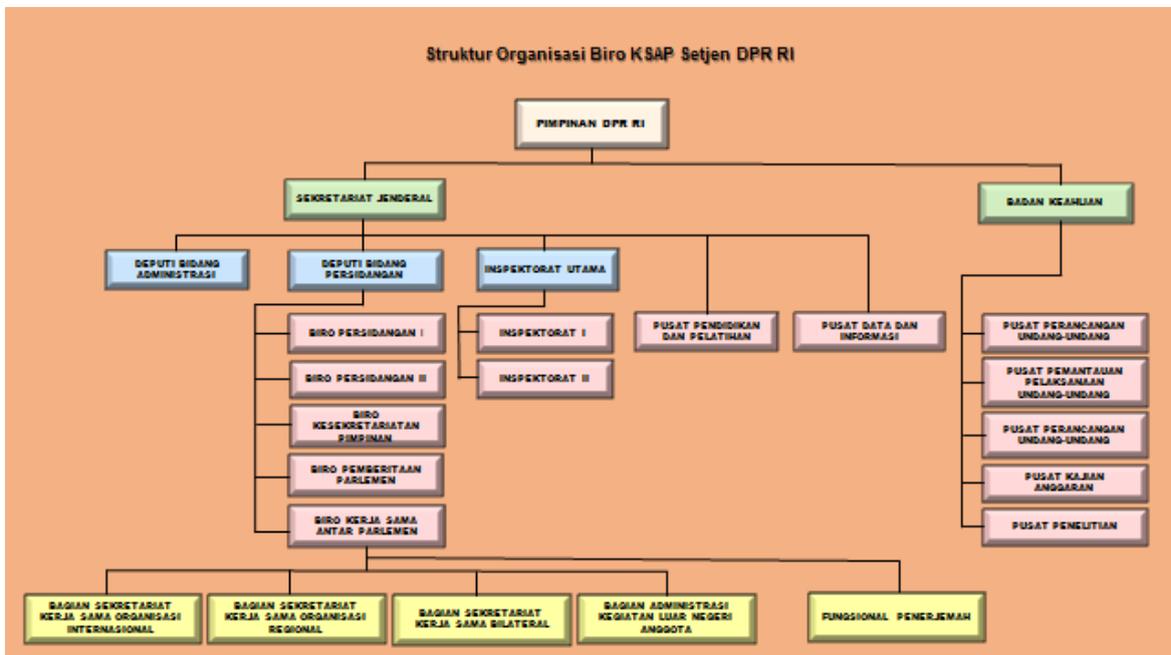
- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- g. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional;
- h. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional;
- i. Penyelenggaraan persidangan kerjasama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral;
- j. Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- k. Penyelenggaraan dukungan alih bahasa;
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m. Penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro KSAP dibagi menjadi 4 Bagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional (KSI); Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional (KSR); Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral (KSB); Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (MINLUNA); dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Biro KSAP dalam Struktur Setjen dan BK DPR RI digambarkan dalam gambar berikut ini :

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN



Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2020

D. Mandat dan Peran Strategis

Biro Kerja Sama Antar Parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja diplomasi parlemen. Kegiatan diplomasi parlemen yang dilakukan dengan berbagai cara (multitrack diplomacy) baik individu, bilateral, regional maupun internasional memerlukan perencanaan dan dukungan teknis, administratif dan keahlian agar efektif dan membawa manfaat bagi berbagai pihak.

Peran strategis BKSAP dalam penyiapan delegasi ke sidang-sidang regional maupun internasional serta menyampaikan hasil-hasil sidang yang dapat diadopsi ke Komisi terkait dirasakan sangat penting.

Selain itu, BKSAP adalah etalase diplomasi parlemen DPR RI. Bagaimana menginformasikan hasil-hasil pertemuan yang dilakukan oleh BKSAP baik didalam dan luar negeri, menyampaikan kepada masyarakat luas perkembangan isu-isu terkini dan posisi DPR RI dalam menyikapi suatu isu internasional, serta menjalin kerjasama dengan parlemen negara sahabat maupun organisasi internasional, menjadi tugas Biro BKSAP untuk mendukung BKSAP melakukan hal-hal tersebut.

Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerja Sama antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah internasional tersebut didukung oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal yang memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada Dewan.



Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP yang berjumlah 50 orang, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang melalui program Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Bukan itu saja, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota *Global Parliamentarians against Corruption (GOPAC)* mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut. Pada tahun 2019 dengan diselenggarakannya *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang ketiga di Bali pada bulan September 2019 atas inisiatif Indonesia, Biro KSAP menjadi sekretariat dari sidang tersebut.

E. Program Reformasi Birokrasi L menuju wilayah Zona Integritas

Pada tahun 2015-2019, Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Setjen DPR RI menjadi Biro KSAP sebagai unit pengungkit Reformasi Birokrasi pada tahun 2018, yaitu program *quick win* Pembuatan Sistem Perjalanan Luar Negeri Anggota Dewan yang merupakan inovasi aplikasi yang dilakukan Biro KSAP sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi Pimpinan DPR RI dalam memberikan persetujuan untuk pengajuan kunjungan kerja luar negeri DPR RI yang dilakukan oleh komisi/badan di DPR RI.

Pada tahun 2019, Biro KSAP ditetapkan sebagai salah zona integritas dilingkungan Setjen DPR RI yang menjadikan Biro KSAP sebagai salah satu role model unit pelayanan dilingkungan Setjen DPR RI yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta pelayanan yang prima.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian laporan Kinerja Biro KSAP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi, penjabaran peran strategis Biro KSAP serta Reformasi Birokrasi yang dilakukan di Biro KSAP
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana kinerja Biro KSAP dan uraian mengenai pengukuran kinerja di Biro KSAP
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi : Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
 - B. Evaluasi dan analisis capaian kinerja : Pada subbab ini diuraikan evaluasi atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan tercapai dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan di Perjanjian kinerja
 - C. Realisasi Anggaran : Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja
 - D. Kinerja lain-lain : Pada subbab ini diuraikan capaian Biro KSAP dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik.





4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro KSAP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro KSAP untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran : Perjanjian Kinerja Biro KSAP, Data Pegawai di lingkungan Biro KSAP, Daftar Pengiriman Delegasi, Daftar dukungan kegiatan rapat-rapat courtesy call dan friendly talk, Laporan pelaksanaan Zona Integritas; Data survey internal, Foto-foto output kegiatan



Bab II : Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI, program kerja Biro KSAP mengacu pada Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputy Bidang Persidangan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang Persidangan dan Kerja Sama antar Parlemen, sehingga visi Biro KSAP, yaitu “Terwujudnya dukungan kegiatan kerjasama antar parlemen yang berkualitas, profesional dan akuntabel”.



Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro KSAP, yaitu:

- Mewujudkan analisis isu-isu bilateral, yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat, serta alih bahasa yang akurat.
- Mewujudkan analisis isu-isu regional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- Mewujudkan analisis isu-isu internasional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- Mengembangkan Database yang akurat dan informasi terbaru untuk mendukung kegiatan kerja sama antar parlemen.

B. Penetapan Kinerja 2019

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, Biro KSAP telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

Tujuan dibuatnya penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi





amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan hasil rapat-rapat dengan Biro Perencanaan Setjen dan BK DPR RI dan persetujuan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, maka Perjanjian Kinerja Biro KSAP tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen
Tahun 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Satker Setjen			
1.	Meningkatnya Kualitas Diplomasasi dukungan Parlemen	1. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang sesuai standar	100%
		2. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai standar	100%
		3. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang sesuai standar	100%
		4. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasasi Perorangan yang sesuai standar	100%
Satker Dewan			
1.	Layanan Sidang.Konferensi di dalam Negeri	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/Seminar Regional/ Internasional	2 konferensi
2.	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan DPR RI di Organisasi Regional/ Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	34 kali
3.	Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	100 Anggota

Yang dimaksud dengan Persentase dukungan kegiatan kerja sama Internasional yang sesuai standar dihitung berdasarkan terlaksananya kerjasama Internasional yang dilakukan oleh DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro KSAP adalah dukungan teknis dan administratif maupun substansi atas kegiatan kerjasama internasional yang dilakukan oleh DPR RI. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk indikator lainnya, namun dengan kegiatan kerjasama yang berbeda-beda sesuai kerjasama yang dilakukan. Target untuk setiap indikator tersebut adalah 100%. Sedangkan untuk Pencapaian kinerja per bulan guna monitoring dan evaluasi dilakukan dengan perhitungan $1/12 \times 100\%$, mengingat sulitnya memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin oleh BKSAP.



Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang ada di Biro KSAP, baik Standar Operasional Prosedur untuk beberapa kegiatan, seperti SOP Pengiriman Delegasi, SOP Penterjemahan maupun SOP yang terkait unit kerja lain, seperti SOP Pengajuan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Setjen, Pelayanan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Paket Meeting Satker Dewan, serta SOP Pelayanan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Paket Meeting Satker Setjen.

Untuk Satker Dewan, karena Kepala Biro KSAP merupakan Penanggungjawab komitmen untuk Anggaran Satker Dewan, maka perlu dalam Laporan Kinerja ini menyampaikan realisasi anggaran satker dewan sebagai bagian dari kinerja Biro KSAP selama tahun 2019 ini.

Periode tahun 2019, Biro KSAP melakukan perubahan penetapan sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bertujuan agar mendekati capaian kinerja yang sebenarnya telah diraih serta lebih akuntabel. Berikut ini sandingan Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja Biro KSAP:

Tabel 2
Matriks Perubahan Indikator Kinerja Biro KSAP tahun 2015-2019

Tahun 2015 – 2018		Tahun 2019	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
Jumlah bahan kebijakan Biro KSAP	4 Dokumen	-	-
Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional	5 dokumen	Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang sesuai standar	100%
Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional	5 dokumen	Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai standar	100%
Jumlah Materi Kerjasama Bilateral	5 Dokumen	Persentase dukungan kegiatan Bilateral yang sesuai standar	100%
Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 Dokumen	Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar	100%



Bab III: Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Biro KSAPDPR RI Tahun 2019 sebagaimana Tabel 4 di bawah ini.



Tabel 3
Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2019

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Satker Setjen				
Meningkatnya Kualitas dukungan Diploması Parlemen	Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang sesuai standar	100%	100%	100 %
	Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai standar	100%	100%	100 %
	Persentase dukungan kegiatan Bilateral yang sesuai standar	100%	100%	100 %
	Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diploması Perorangan yang sesuai standar	100%	100%	100 %
Satker Dewan :				
Layanan Sidang.Konferensi di dalam Negeri	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/Seminar Regional/ Internasional	2 konferensi	1 Konferensi	50%
Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan DPR RI di Organisasi Regional/ Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	34 kali	45 kali	132, 35%
Layanan Pelaksanaan Peran Diploması Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	100 Anggota	88 Anggota	88%



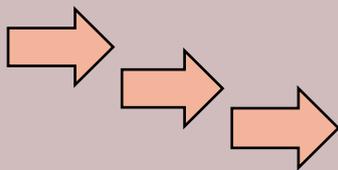
Dari table tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian kinerja Satker Setjen telah terealisasi sebesar 100% untuk 4 indikator kerjanya. Hal ini karena setiap kegiatan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI khususnya BKSAP DPR RI, seluruhnya mendapat dukungan baik teknis, administrasi maupun substansi dari Biro KSAP.

Sedangkan untuk Satker Dewan untuk indikator kinerja Layanan Sidang/Konferensi didalam negeri mencapai target 50 % mengingat pada tahun 2019 merupakan tahun kampanye dan periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 hanya sampai akhir September 2019 sehingga pada tahun 2019 diputuskan hanya menyelenggarakan 1 kali konferensi; indikator kinerja Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri telah mencapai 132,35%, sedangkan untuk Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI mencapai 88%. Hal ini disebabkan pada akhir tahun 2019, sebagian Anggota tidak melaksanakan perandiplomasi perorangan karena kegiatan lain baik dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan dan kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024.

Capaian kinerja Biro KSAP pada tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat perbedaan indikator maupun target dalam penetapan kinerja yang dilakukan oleh Biro KSAP.

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran



Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen

Indikator 1

Persentase dukungan kegiatan kerjasama Internasional yang sesuai standar

Target

100%

Realisasi

100%

Capaian

100%



Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Internasional yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama internasional yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerjasama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama internasional baik itu dukungan administratif maupun dukungan substansi.

Pada tahun 2019, terdapat 19 kali pengiriman Delegasi ke Sidang Internasional seperti ke Sidang Inter-Parliamentary Union di Jenewa dan Beograd, Sidang Parliamentary Union of OIC Member State Countries di Maroko, Sidang Organization on Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, Sidang Young Parliamentarians, dan sebagainya. Biro KSAP Memberikan dukungan atas persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan atas kegiatan Delegasi ke Sidang-Sidang tersebut. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat diluar jam kantor, mengundang pakar, dan juga mengirimkan Delegasi Setjen DPR RI ke Sidang ASGP – IPU dan penterjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan delegasi ke sidang tersebut, penerjemahan langsung, maupun penerjemahan dokumen-dokumen hasil sidang yang akan disampaikan ke Komisi terkait di DPR maupun pemerintah. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh pengiriman delegasi ke sidang internasional telah mendapatkan dukungan dari Biro KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam menghadiri Sidang-Sidang Internasional berupa pembuatan itinerary delegasi, agenda delegasi, draft intervensi delegasi, Draft SK Pimpinan, Draft Resolusi, Buku Posisi Delegasi, Leaflet, Draft Press Release, Draft Laporan Delegasi serta administrasi perjalanan.

Indikator kinerja Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP DPR RI ke Sidang Internasional sejak tahun 2015 – 2019 serta output dukungan Biro KSAP atas kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Internasional
dan output dukungan kegiatan Biro KSAP
Tahun 2015 - 2019

Output dukungan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	14	27	29	26	19
Agenda Delegasi	14	27	29	26	19
Draft intervensi Delegasi	14	27	29	26	19
Draft SK Pimpinan Dewan	14	27	29	26	19
Draft Resolusi	14	27	29	26	19
Buku Posisi Delegasi	14	27	29	26	19
Leaflet Delegasi	14	27	29	26	19
Buku Saku Delegasi	14	27	29	26	19
Press release Sidang	14	27	29	26	19
Draft Laporan Delegasi	14	27	29	26	19
Administrasi Perjalanan	14	27	29	26	19





Jika melihat dari tabel diatas maka terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi ke Sidang Internrnasional pada tahun kedua dan ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan dalam jumlah ditahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masa keanggotaan hanya sampai bulan akhir bulan septemer 2019 dan juga masa-masa kampanye. Namun demikian seluruh pengiriman delegasi telah mendapatkan dukungan administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar pengiriman delegasi terlampir.

Gambar 2
Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Internasional Tahun 2015-2019



Selain itu, Biro KSAP juga memberikan dukungan administrasi dan substansi dalam Penyelenggaraan Konferensi yang diinisiasi DPR RI untuk agenda Tujuan Pembangunan berkelanjutan, yaitu the 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (the 3rd WPFSD), kegiatan the 7th GOPAC Conference yang berlangsung di Doha, maupun kegiatan Kunker dalam negeri yang dilakukan dalam rangka Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Barat, serta BKSAP Day ke Provinsi Bali.

Indikator 2

Persentase dukungan kegiatan kerjasama Regional yang sesuai standar

Target

100%

Realisasi

100%

Capaian

100%



Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Regional yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama Regional yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerjasama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama internasional baik itu dukungan administratif maupun dukungan substansi.

Pada tahun 2019, terdapat 12 kali pengiriman Delegasi ke Sidang Regional seperti ke Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Sidang Asia Parliamentary Assembly, Sidang Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs, Sidang Speakers of the Eurasian Countries Parliaments, Sidang Asia Pacific Summit, dan Sidang Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development. Biro KSAP Memberikan dukungan atas persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan atas kegiatan Delegasi ke Sidang-Sidang tersebut. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat diluar jam kantor, mengundang pakar, dan penterjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan delegasi ke sidang tersebut, penerjemahan langsung, maupun penerjemahan dokumen-dokumen hasil sidang yang akan disampaikan ke Komisi terkait di DPR maupun pemerintah. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh pengiriman delegasi ke sidang regional telah mendapatkan dukungan dari Biro KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam menghadiri Sidang-Sidang Regional berupa pembuatan itinerary delegasi, agenda delegasi, draft intervensi delegasi, Draft SK Pimpinan, Draft Resolusi, Buku Posisi Delegasi, Leaflet, Draft Press Release, Draft Laporan Delegasi serta administrasi perjalanan.

indikator kinerja Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP DPR RI ke Sidang Regional sejak tahun 2015 – 2019 serta output dukungan kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Regional
dan output dukungan kegiatan
Tahun 2015 - 2019

Output Dukungan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	8	13	14	10	12
Agenda Delegasi	8	13	14	10	12
Draft intervensi Delegasi	8	13	14	10	12
Draft SK Pimpinan Dewan	8	13	14	10	12
Draft Resolusi	8	13	14	10	12
Buku Posisi Delegasi	8	13	14	10	12
Leaflet Delegasi	8	13	14	10	12
Buku Saku Delegasi	8	13	14	10	12
Press release Sidang	8	13	14	10	12
Draft Laporan Delegasi	8	13	14	10	12
Administrasi Perjalanan	8	13	14	10	12



Jika melihat dari tabel diatas maka terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi ke Sidang Regional pada tahun kedua dan ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan dalam jumlah ditahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masa keanggotaan hanya sampai bulan akhir bulan september 2019 dan juga masa-masa kampanye. Namun demikian seluruh pengiriman delegasi telah mendapatkan dukungan administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar delegasi terlampir.

Gambar 3
Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Regional Tahun 2015-2019



Selain itu, Biro KSAP juga memberikan dukungan administrasi dan substansi dalam kegiatan seminar yang dilakukan DPR RI berjudul *'Laying the Foundation for future Comperation in Promotig Accountability and Transparancey in ASEAN'* pada tanggal 26 Februari 2019, serta kegiatan Kunker dalam negeri yang dilakukan dalam rangka Panja Kerjasama Ekonomi Regional ke Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Barat, serta BKSAP Day ke Provinsi Bali.

Indikator 3

Persentase dukungan kegiatan kerjasama Bilateral yang sesuai standar

Target

100%

Realisasi

100%

Capaian

100 %



Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Bilateral yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama Bilateral yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerjasama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama Bilateral baik itu dukungan administratif maupun dukungan substansi.

Pada tahun 2019, terdapat 14 kali pengiriman Delegasi dalam rangka kerjasama Bilateral ke negara-negara sahabat seperti Arab Saudi, Selandia Baru, Portugal, Perancis, Brazil, Korea Utara, Fiji, Turki, Kuba Ekuador, Argentina, Ethiopia dan Ceko. Biro KSAP Memberikan dukungan atas persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan atas kegiatan Delegasi dalam rangka kerjasama Bilateral ke negara-negara sahabat. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat diluar jam kantor, penjajakan, penterjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan delegasi ke sidang tersebut, dan pembuatan draft Memorandum of Understanding. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh pengiriman delegasi dalam melaksanakan Kerjasama Bilateral telah mendapatkan dukungan dari Biro KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam melakukan Kerjasama bilateral berupa pembuatan itinerary delegasi, agenda delegasi, draft Memorandum of Understanding, Draft SK Pimpinan, Buku saku, Leaflet, Draft Press Release, Draft Laporan Delegasi serta administrasi perjalanan.

indikator kinerja Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP DPR RI yang melakukan kerjasama bilateral sejak tahun 2015 – 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Jumlah Pengiriman Delegasi BKSAP dalam Kerjasama Bilateral
Tahun 2015 - 2019

Output Dukungan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	6	21	17	18	14
Agenda Delegasi	6	21	17	18	14
Draft SK Pimpinan Dewan	6	21	17	18	14
Leaflet Delegasi	6	21	17	18	14
Buku Saku Delegasi	6	21	17	18	14
Press release Sidang	6	21	17	18	14
Draft Laporan Delegasi	6	21	17	18	14
Administrasi Perjalanan	6	21	17	18	14

Jika melihat dari tabel diatas maka terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi melakukan kerjasama bilateral pada tahun kedua dan ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan dalam jumlah ditahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masa keanggotaan hanya sampai akhir bulan september 2019 dan juga masa-masa kampanye. Namun demikian seluruh pengiriman delegasi telah mendapatkan dukungan



administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar pengiriman delegasi terlampir.

Gambar 4
Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP dalam Kerjasama Bilateral Tahun 2015-2019



Selain memberikan dukungan dalam melakukan kunjungan Kerja dalam rangka GKSB maupun Kunjungan Teknis dalam rangka kerjasama Bilateral, Biro KSAP juga memberi dukungan administratif dalam hal penjajakan ke parlemen luar negeri bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI (Pimpinan DPR, Badan, komisi-komisi ,Pansus) dan juga Sekretariat Jenderal.

Disamping itu Biro KSAP juga memberi dukungan dan fasilitasi kegiatan menerima tamu-tamu asing baik courtesy call, friendly talk, dan sebagainya. Berikut ini data jumlah Penerimaan tamu-tamu asing

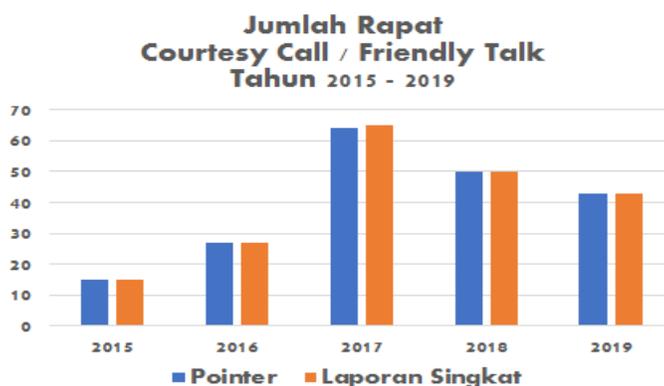
Tabel 7
Jumlah rapat-rapat Courtesy Call/Friendly Talk Tahun 2015 - 2019

Output Dukungan Kegiatan	2015	2016	Tahun 2017	2018	2019
Draft Pointers	15	27	64	50	43
Draft Laporan Singkat	15	27	64	50	43



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tahun 2019 penerimaan tamu asing berjumlah 43 yang berarti terjadi penurunan jumlah penerimaan tamu-tamu asing di DPR RI jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 50 kali. Penurunan tersebut dikarenakan untuk tahun 2019, merupakan tahun kampanye dan juga berakhir pada tanggal 30 September. Pada awal keanggotaan DPR RI periode 2019-2024 belum terdapat penerimaan tamu, karena DPR RI masih dalam penyusunan dan penetapan Pimpinan maupun Anggota di alat kelengkapan dewan

Gambar 5
Output Dukungan Kegiatan Rapat Courtesy Call/Friendly Talk DPR RI Tahun 2015-2019



Indikator 4

Persentase dukungan kegiatan kerjasama Diplomasi perorangan yang sesuai standar

Target

100%

Realisasi

100%

Capaian

100 %

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama diplomasi perorangan yang dilakukan oleh DPR RI. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama Diplomasi Perorangan berupa dukungan administratif maupun dukungan substansi.



Pada tahun 2019, terdapat 88 Anggota DPR RI melakukan kegiatan diplomasi perorangan ke negara-negara sahabat. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat diluar jam kantor, penjajakan, penterjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan dokumen perjalanan. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh kegiatan diplomasi perorangan telah mendapatkan dukungan dari Biro KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam melakukan diplomasi perorangan berupa pembuatan itinerary delegasi, agenda delegasi, Draft SK Pimpinan Dewan, Dokumen penjajakan dan administrasi perjalanan.

Indikator kinerja Persentase dukungan kegiatan Kerjasama diplomasi perorangan yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI yang melakukan kerjasama Diplomasi Perorangan sejak tahun 2015 – 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8
Jumlah Pengiriman Delegasi BKSAP dalam Kerjasama Diplomasi Perorangan dan Output Dukungan Kegiatan Tahun 2015 - 2019

Output Dukungan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	1	77	227	118	88
Agenda Delegasi	1	77	227	118	88
Draft SK Pimpinan Dewan	1	77	227	118	88
Laporan Delegasi	1	77	227	118	88
Administrasi Perjalanan	1	77	227	118	88

Catatan : Jumlah dokumen berdasarkan jumlah negara yang dikunjungi

Dari tabel diatas terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi perorangan pada tahun ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan ditahun 2018, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Anggota fokus kepada persiapan Pemilu. Seluruh pengiriman delegasi telah mendapatkan dukungan administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar pengiriman delegasi terlampir.



Gambar 6
Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP dalam Kerjasama Diplomasi Perorangan Tahun 2015-2019



Selain memberikan dukungan dalam kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan, Biro KSAP juga memberikan dukungan penterjemahan baik lisan maupun tertulis untuk membantu tugas-tugas Pimpinan DPR RI, seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan output kegiatan selama tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 9
Output Kegiatan Penterjemahan Lisan dan Tertulis Tahun 2019

No	Terjemahan Lisan		Terjemahan Tertulis	
	Jenis	Jumlah	Jenis Dokumen	Jumlah
1.	Bahasa Inggris	39 kegiatan	Kerangka Acuan	22 item
2.	Bahasa lainnya	6 kegiatan	Surat Menyurat	158 item
3.	Bahasa Isyarat	2 kegiatan	Materi Sidang/Rapat	49 item
4.			Daftar Riwayat Hidup	37 item
5.			Situs (website)	1 item
6.			Buku/Makalah/Leaflet	5 item
7.			Dokumen Berbahasa Arab, Perancis, Spanyol, Jepang	27 item
Jumlah		47 Kegiatan	Jumlah	299 item



C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi Anggaran

Biro KSAP Setjen DPR RI selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Pada Tahun 2019, total keseluruhan Pagu Anggaran di Biro KSAP Setjen DPR RI sebesar Rp.110.956.392.000,00 sebagaimana terlihat dalam Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 10
Pagu Anggaran BKSAP DPR RI Tahun 2019

No	Satker	Pagu Anggaran
1.	Dewan	Rp.106.559.712.000,00
2.	Setjen	Rp.4.396.680.000,00
Jumlah		Rp.110.956.392.000,00

Sumber : Bagian Perencanaan

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 31 Ayat (1) huruf j disebutkan bahwa "Pimpinan DPR menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR". Implementasi atas pasal tersebut dijabarkan dalam pasal lain pada peraturan yang sama, dimana penyusunan rencana kerja dan anggaran DPR dilakukan oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan diserahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Satker Dewan diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan.

Dari Pagu Anggaran BKSAP DPR RI pada tahun 2019 sebesar Rp.110.956.392.000,00 telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.92.964.051.854,00 atau 83,78 % dari pagu. Besaran realisasi anggaran tersebut berasal dari realisasi anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan.

Pagu yang dikelola Satker Dewan sebesar Rp.106.559.712.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.89.196.771.454,00 atau 83,71% dari pagu. Sedangkan Pagu yang dikelola Satker Setjen sebesar Rp.4.396.680.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.3.767.280.400,00 atau 85,68% dari pagu.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Biro KSAP telah berhasil meningkatkan kinerja keuangannya. Pada tahun 2018 capaian kinerja Satker Dewan dan Satker Setjen di Biro KSAP sebesar 68,15% dari Total Pagu sebesar Rp. 188.752.362.000,00. Peningkatan kinerja tersebut tentu saja berkat komunikasi dan koordinasi baik dengan Pimpinan BKSAP maupun



unit terkait antara lain dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi sehingga jika masih terdapat anggaran yang belum terserap, segera dilakukan revisi Anggaran agar penyerapannya optimal

Anggaran Satker Dewan dipergunakan untuk kegiatan layanan sidang konferensi didalam negeri berupa penyelenggaraan Sidang *The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* di Bali, Layanan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri berupa keikutsertaan DPR RI dalam sidang-sidang Internasional, regional maupun kegiatan kerjasama bilateral sebanyak 45 kali dan layanan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI sebanyak 88 orang.

Tidak tercapainya Anggaran Satker Dewan secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak terlaksananya konferensi didalam negeri karena waktu yang sangat singkat sementara kegiatan pengiriman delegasi cukup padat, selain itu juga karena tahun 2019 merupakan masa kampanye sehingga banyak Anggota tidak dapat berangkat ke sidang-sidang internasional/regional dan memilih untuk konsentrasi di daerah konstituennya.

Sedangkan Anggaran Satker Setjen digunakan untuk rapat koordinasi internal, penterjemahan, rapat koordinasi dengan pihak lain, Honorarium tim zona integritas dan tim penilai kenaikan pangkat jabatan fungsional penterjemah dan penyusun pedoman kenaikan pangkat jabatan fungsional penterjemah, menghadiri konferensi ASGP di Maroko, Qatar, Serbia serta ke Australia, Jasa Konsultan penyelenggaraan Konferensi, souvenir, FGD, Jamuan rapat, pembuatan video zona integritas dan sebagainya.

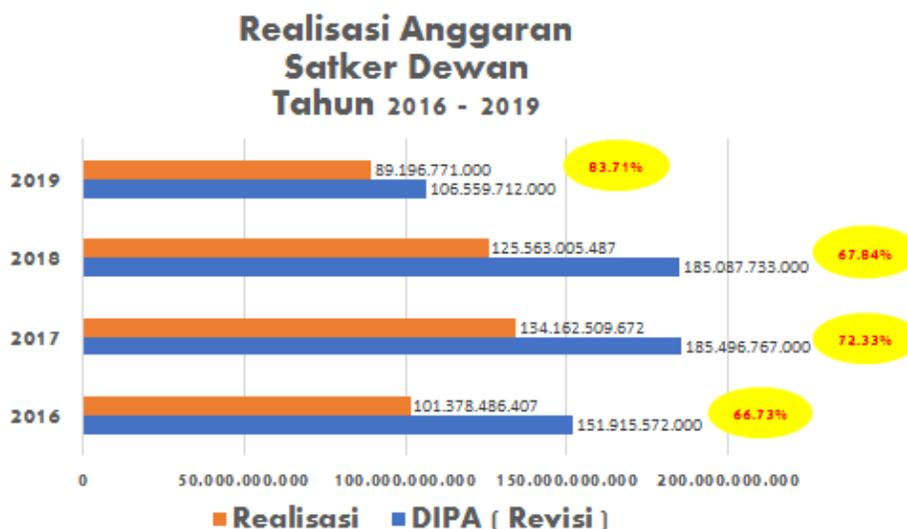
Tabel 11
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Dewan
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun	DIPA (Revisi)	Realisasi	Persentase
2016	Rp. 151.915.572.000,00	Rp.101.378.486.407,00	66,73%
2017	Rp. 185.496.767.000,00	Rp. 134.162.509.672,00	72,33%
2018	Rp. 185.087.733.000,00	Rp.125.563.005.487,00	67,84%
2019	Rp. 106.559.712.000,00	Rp.89.196.771.454,00	83,71%

Sumber : Bagian Perencanaan, Januari 2020



Gambar 7
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Dewan
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019



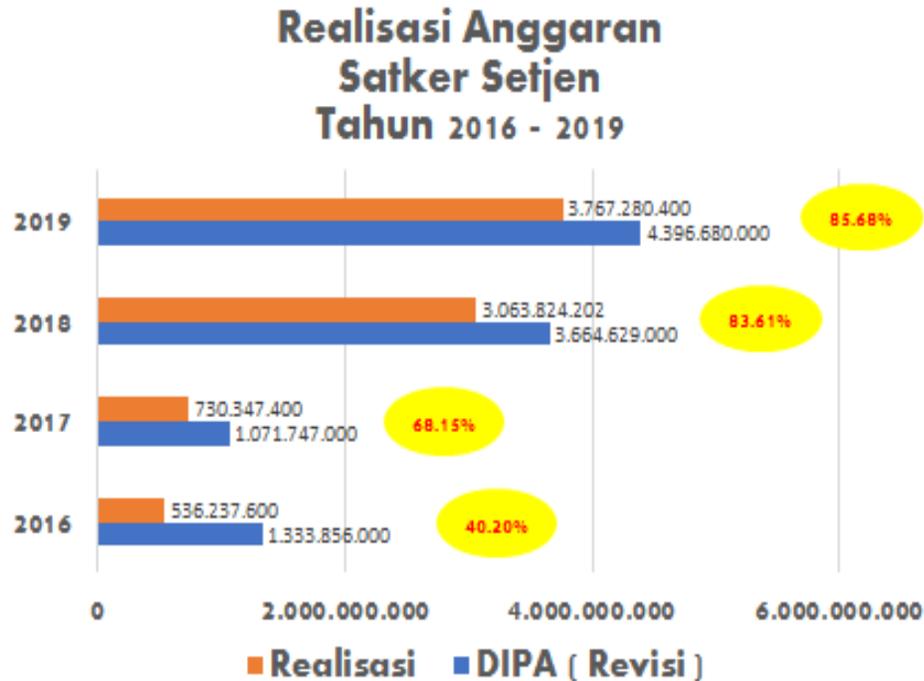
Tabel 12
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun	DIPA (Revisi)	Realisasi	Persentase
2016	1.333.856.000,00	536.237.600,00	40,20%
2017	1.071.747.000,00	730.347.400,00	68,15%
2018	3.664.629.000,00	3.063.824.202,00	83,61%
2019	4.396.680.000,00	3.767.280.400,00	85,68%

Sumber : Bagian Perencanaan, Januari 2020



Gambar 8
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019



Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Capaian kinerja Keuangan Biro KSAP terus meningkat dari tahun ke tahun, Tentu saja peningkatan itu berkat kerjasama seluruh jajaran dilingkungan Biro KSAP maupun Deputy Bidang Persidangan dan unit terkait.

D. Kinerja Lain-lain

Pada Tahun 2019, Biro KSAP berhasil melaksanakan penugasan Setjen DPR RI dalam sebagai unit zona integritas dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI. Biro KSAP telah berhasil melakukan program-program penguatan unit kerja Biro KSAP baik dalam hal akuntabilitas, ketatalaksanaan, peningkatan SDM, dan Kualitas pelayanan publik. Hal ini antara lain dengan adanya website BKSAP yang memuat berbagai informasi kegiatan yang dilakukan oleh BKSAP dan dapat diakses publik. Selain itu peningkatan indeks kepuasan atas layanan Biro KSAP juga diperoleh hasil dengan kualitas Baik. Survey ini disebarakan kepada Anggota BKSAP setelah mereka melakukan kegiatan menghadiri rapat-rapat di BKSAP, FGD, maupun menghadiri sidang di Luar Negeri. Hasil Survey terlampir.



Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Setjen DPR RI pada tahun 2019 tentang indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan Diplomasi Parlemen, dari 215 responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 65 responden atau 30,23 persen dan menyatakan puas sebanyak 147 responden atau 68,37 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 1,40 persen, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. Hal ini merupakan capaian yang menggembirakan bagi Biro KSAP, namun menjadi tantangan agar kedepan tidak ada lagi responden yang menyatakan tidak puas atas layanan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh Biro KSAP.

Capaian lain yaitu, Biro KSAP menjadi Juara kedua (Silver winner) untuk kategori Alat Kelengkapan DPR RI pada pemeringkatan PPID dilingkungan Setjen DPR RI pada bulan April 2019. Sebagai bagian dari unit pelayanan yang mendukung DPR RI menjadi Parlemen modern dan terbuka, Biro KSAP terpacu untuk lebih meningkatkan dukungannya kepada dewan dalam mensosialisasikan kegiatan diplomasi parlemen kepada publik. Pada tahun 2019, Biro KSAP membentuk Tim untuk mengelola muatan dari website BKSAP yang berada di laman website DPR RI serta media sosial BKSAP lainnya seperti instagram, twitter dan youtube. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya BKSAP DPR RI yang lebih terbuka dan modern.



Bab IV: Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro KSAP Tahun 2019 merupakan akhir untuk keanggotaan DPR RI periode 2014-2019. Secara umum seluruh target yang diperjanjikan pada tahun 2019 telah memiliki capaian 100%, yaitu:

1. Persentase dukungan kegiatan kerjasama internasional yang sesuai standar, memiliki nilai capaian 100%;
2. Persentase dukungan kegiatan kerjasama Regional yang sesuai standar, memiliki nilai capaian 100%;
3. Persentase dukungan kegiatan kerjasama Bilateral yang sesuai standar, memiliki nilai capaian 100%;
4. Persentase dukungan kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar, memiliki nilai capaian 100%.



Sebagai Penanggungjawab Komitmen untuk Anggaran Satker Dewan maupun Satker Setjen, Tahun 2019 capaian kinerja Keuangan untuk Satker Dewan sebesar 83,71% dari Pagu sebesar Rp.Rp.106.559.712.000,00, atau setara dengan Rp.89.196.771.454,00. Sedangkan capaian kinerja keuangan untuk Satker Setjen sebesar 85,68% dari Pagu Rp.4.396.680.000,00, atau setara dengan Rp. 3.767.280.400,00

Capaian kinerja BKSAP dapat terwujud dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti komunikasi yang intensif dan efektif dengan multistakeholder maupun pengguna layanan baik internal maupun eksternal, koordinasi, rapat-rapat yang efektif, peningkatan budaya kerja yang lebih cepat dan efektif, revisi anggaran, dan peningkatan kapabilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Biro KSAP.

Kendala yang seringkali ditemukan dalam melakukan pelayanan kepada Dewan dalam kegiatan Diplomasi Parlemen adalah singkatnya waktu persiapan, padatnya kegiatan, kekurangan SDM, dan lain-lain.

Sebagai salah satu unit Zona Integritas di lingkungan Setjen DPR RI, Biro KSAP telah mencapai target yang ditetapkan kendati harus meningkatkannya lagi agar mendapat nilai yang memuaskan antara lain dengan mendapatkan inovasi .



B. Rekomendasi

Untuk mencapai target yang lebih optimal, maka Biro KSAP perlu melakukan lebih banyak terobosan, serta perencanaan Anggaran yang lebih tepat guna dan dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

Membangun sistem kerja yang lebih baik tentu saja diperlukan bagi peningkatan kinerja Biro KSAP seperti memperbanyak membuat Standar Operasional Prosedur yang ada dilingkungan Biro KSAP, membuat sistem evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan SOP yang sudah ada, peningkatan kedisiplinan, ketepatan waktu, membuat maklumat pelayanan, dan sistem survey kepada Anggota Dewan dan masyarakat yang lebih baik dan meluas, sistem komunikasi digital dengan publik yang lebih mudah, dan peningkatan kualitas website maupun media sosial yang dimiliki BKSAP.

Terkait zona integritas, maka Biro KSAP diharapkan dapat segera menemukan inovasi yang unik dan besar manfaatnya bagi kepentingan publik.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA BIRO KSAP



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Damayanti, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, Februari 2019

Pihak Pertama,

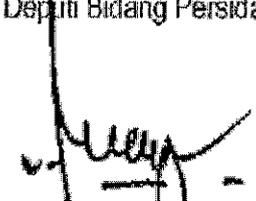
Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil
NIP. 19601002 198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang sesuai standar 2. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai standar 3. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang sesuai standar 4. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar	100% 100% 100% 100%

Kegiatan	Anggaran
Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen	Rp4.396.680.000,-

Deputi Bidang Persidangan,


Dra. Damayanti, M.Si
NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, Februari 2019
Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen,


Endah Tjahjani Dwirini R, S.S., M.Phl
NIP. 19601002 198203 1 004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA SATKER DEWAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen

selanjutnya disebut pihak pertama

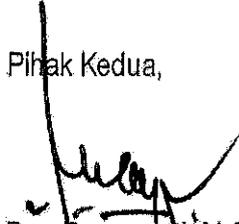
Nama : Dra. Damayanti, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

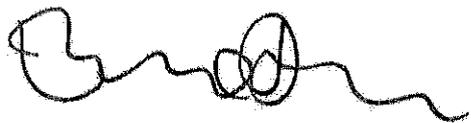
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, Februari 2019
Pihak Pertama,


Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NIP. 19680402 199302 2 001

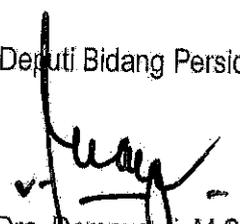
PERJANJIAN KINERJA SATKER DEWAN TAHUN 2019

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Layanan Sidang/Konferensi di Dalam Negeri.	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi / Seminar Regional / Internasional.	2 Konferensi
2.	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.	Jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional / Internasional dalam rangka di plomasi parlemen.	34 Kali
3.	Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen.	50 Anggota

Satker/Program/Kegiatan	Anggaran
Satker : Dewan	Rp 83.366.242.000,00
Program : Penguatan Kelembagaan DPR RI	Rp 83.366.242.000,00
Kegiatan : Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional	Rp 83.366.242.000,00

Deputi Bidang Persidangan,


Dra. Damayanti, M.Si.

NIP. 19620211 198703 2 002

Jakarta, Februari 2019
Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen,



Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.

NIP. 19680402 199302 2 001

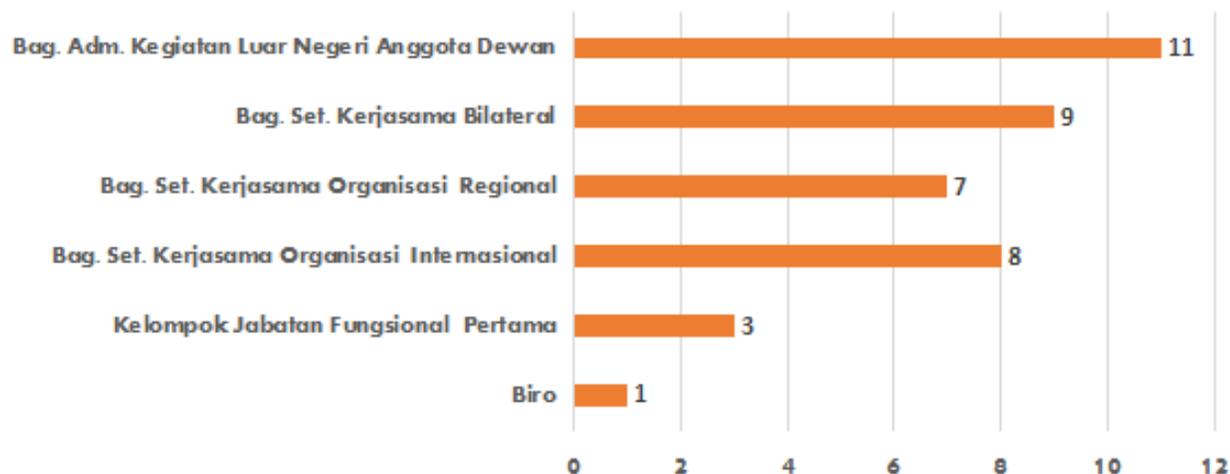


DATA PEGAWAI BIRO KSAP

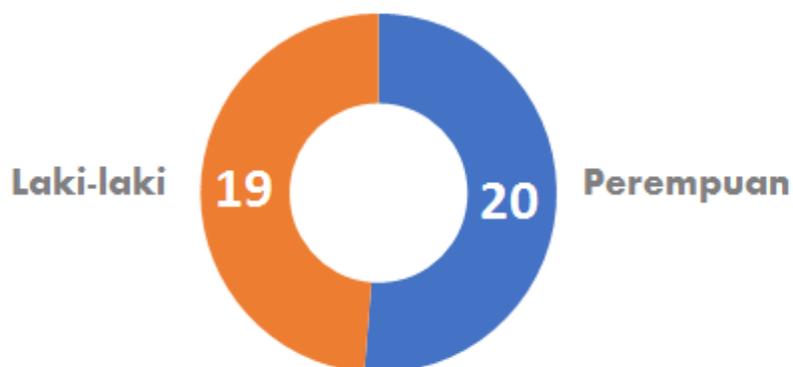


Data Pegawai di Biro KSAP Tahun 2019
(Sumber : Bagian Kepewaiian Setjen DPR RI)

**Data Pegawai
Biro KSAP Per Bagian
Tahun 2019**

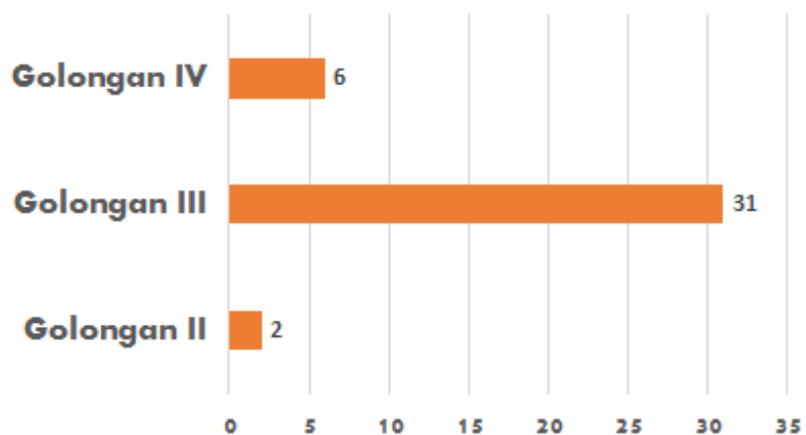


**Data Pegawai
Biro KSAP Berdasar Gender
Tahun 2019**

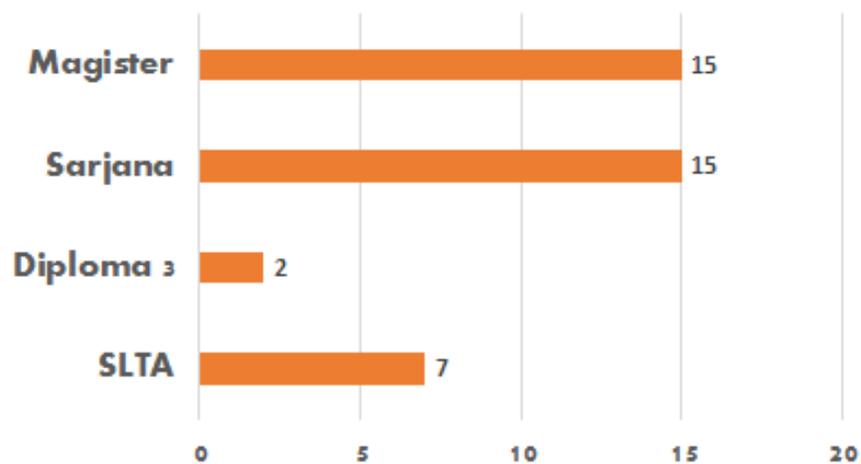




Data Pegawai Biro KSAP Berdasar Golongan Tahun 2019



Data Pegawai Biro KSAP Berdasar Pendidikan Tahun 2019





DAFTAR PENGIRIMAN DELEGASI



Data Pengiriman Delegasi ke Sidang-sidang Internasional Tahun 2019

No	Sidang	Keterangan
1.	Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Arab Region Parliamentary Forum on the 2030 Agenda, tanggal 23 – 27 Januari 2019, di Beirut – Lebanon	MP.III TS. 2018-2019
2.	Delegasi DPR RI menghadiri Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) Global Parliamentary Network, tanggal 12 Februari 2019, di Paris – Perancis	MP.III TS. 2018-2019
3.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 2019 Parliamentary Hearing at the United Nations, tanggal 18-24 Februari 2019, di New York – Amerika Serikat	MP.III TS. 2018-2019
4.	Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Mobilising Global Voice: Perspective from the Global South, tanggal 26 Februari – 2 Maret 2019, di London – Inggris	MP.III TS. 2018-2019
5.	Delegasi DPR RI ke Sidang 14th Session of the Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) and Related meetings, tanggal 10-14 Maret 2019, di Rabat – Maroko	MP.IV TS. 2018-2019
6.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 140th Assembly of the Inter-Parliamentary Union and Related meetings, tanggal 6-10 April 2019, di Doha – Qatar	MP.IV TS. 2018-2019
7.	Delegasi DPR RI ke Sidang the Organizational for Economic Co-operation and Development (OECD) Forum, 18-23 Mei 2019, di Paris – Perancis	MP.IV TS. 2018-2019
8.	Delegasi DPR RI ke Sidang the Second Regional Seminar for the Asia Pacific Region Parliaments on Achieving the Sustainable Development Goals, tanggal 25-30 Mei 2019, di Ulaan baatar - Mongolia	MP.IV TS. 2018-2019
9.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 14th Parliamentary Intelligence Security Forum, tanggal 19-23 Juni 2019 di Paris – Perancis	MP.V TS. 2018-2019
10.	Delegasi DPR RI ke Sidang Women Political Leaders (WPL) Summit 2019, tanggal 24 – 29 Juni 2019, di Tokyo – Jepang	MP.V TS. 2018-2019
11.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 2019 High Level Political Forum (HLPF) session, tanggal 9 – 18 Juli 2019, di New York – Amerika Serikat	MP.V TS. 2018-2019



No	Sidang	Keterangan
12.	Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tanggal 22 – 28 Juli 2019, ke Republik Kolombia	MP.V TS. 2018-2019
13.	Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tanggal 16 – 22 Agustus 2019, ke Kerajaan Maroko	MP.V TS. 2018-2019
14.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 6th Inter-Parliamentary Union (IPU) Global Conference of Young Parliamentarians, tanggal 9 – 10 September 2019 di Asuncion, Paraguay	MP.V TS. 2018-2019
15.	Delegasi DPR RI ke Indonesia Cultural Festival (ICF), tanggal 11-15 September 2019, di Baku Azerbaijan	MP.V TS. 2018-2019
16.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 141st Assembly of the Inter-Parliamentary Union and related meetings, tanggal 12-18 Oktober 2019, di Beograd – Republik Serbia	MP.I TS. 2019 - 2020
17.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 6th G20 Parliamentary Speakers' summit (P20), tanggal 4-5 November 2019, di Tokyo – Jepang	MP.I TS. 2019 - 2020
18.	Delegasi DPR RI dalam rangka Persiapan 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), tanggal 9-10 Desember 2019, di Doha – Qatar	MP.I TS. 2019 - 2020
19.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), tanggal 5-12 Desember 2019, di Doha – Qatar	MP.I TS. 2019 - 2020



Data Pengiriman Delegasi ke Sidang-sidang Regional Tahun 2019

No	Sidang	Keterangan
1.	Delegasi DPR RI ke Sidang The 27 th Annual Meeting of The Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), tanggal 13 – 18 Januari 2019, di Seam Real – Kamboja	MP.III TS. 2018-2019
2.	Sidang APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs, tanggal 12-15 Februari 2019, di Bangkok - Thailand	MP.IV TS. 2018-2019
3.	Delegasi BKSAP DPR RI Kunjungan Kerja dalam rangka Kerjasama Ekonomi Regional, tanggal 11-17 Maret 2019, di Budapest - Hungaria	MP.IV TS. 2018-2019
4.	Delegasi BKSAP DPR RI Kunjungan Kerja dalam rangka Kerjasama Ekonomi Regional, tanggal 11-17 Mei 2019, di Roma – Italia	MP.V TS. 2018-2019
5.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 34th ASEAN Summit- AIPA interface meeting, tanggal 20 – 23 Juni 2019 di Bangkok Thailand	MP.V TS. 2018-2019
6.	Delegasi DPR RI ke Sidang Sanding Committee Asian Parliamentary Assembly (APA) on Political Affairs, tanggal 25 – 29 Juni 2019, di Isfahan – Iran	MP.V TS. 2018-2019
7.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 2nd International Forum on Development of Parliamentarism, tanggal 29 Juni – 4 Juli 2019, di Moskow – Rusia	MP.I TS. 2019-2020
8.	Delegasi DPR RI ke Sidang the First Pacific Exposition, tanggal 11 – 14 Juli 2019 di Auckland, New Zealand	MP.IV TS. 2018-2019
9.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 40th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), tanggal 25-30 Agustus 2019, di Bangkok Thailand	MP.V TS. 2018-2019
10.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 4th Meeting of Speakers of the Eurasian Countries Parliaments, tanggal 23 – 24 September 2019, di Nur Sulthan City, The Republic of Kazakhstan	MP.V TS. 2018-2019
11.	Delegasi DPR RI ke Sidang the 19th General Assembly of Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)	MP.I TS. 2019-2020



No	Sidang	Keterangan
12.	Delegasi DPR RI ke Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-12, tanggal 12-18 Desember 2019, di Antalya - Turki	MP.I TS. 2019-2020



Data Pengiriman Delegasi dalam rangka Kerjasama Bilateral Tahun 2019

No	Kunjungan Kerja Sama Bilateral	Keterangan
1.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Arab Saudi, Tanggal 8-14 April 2019, dipimpin oleh Tamsil Linrung (F-PKS)	MP.IV TS. 2018-2019
2.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Selandia Baru, Tanggal 16 – 22 Juni 2019, dipimpin oleh Dr. M. Ali Taher (F-PAN)	MP.V TS. 2018-2019
3.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Selandia Baru, Tanggal 16 – 22 Juni 2019, dipimpin oleh Dr. M. Ali Taher (F-PAN)	MP.V TS. 2018-2019
4.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Perancis, Tanggal 4 – 10 Juli 2019, dipimpin oleh Dr. Effendi M.S. Simbolon, M.IPol (F-PDIP)	MP.V TS. 2018-2019
5.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Brazil, Tanggal 6-12 Juli 2019, dipimpin oleh Mukhamad Misbakhun, S.E. (F-PG)	MP.V TS. 2018-2019
6.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Korea Utara Tanggal 1-7 September 2019, dipimpin oleh Dr. Dr. Nova Riyanti Yuusf, Sp.Kj (F-PD)	MP.I TS. 2019-2020
7.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Fiji, Tanggal 16 – 22 September 2019, dipimpin oleh Sudin, SE (F-PDIP)	MP.I TS. 2019-2020
8.	Kunjungan Kerja Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Turki, Tanggal 17 – 23 September 2019, dipimpin oleh Drs. H. Roem Kono (F-PG)	MP.I TS. 2019-2020
9.	Kunjungan Teknis BKSAP ke Kuba, Tanggal 19-25 Mei 2019, dipimpin oleh Dave Fikarno (F-PG)	MP.V TS. 2018-2019
10.	Kunjungan Teknis BKSAP ke Turki, Tanggal 30 Juni – 5 Juli 2019, dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf (F-PD)	MP.V TS. 2018-2019
11.	Kunjungan Teknis BKSAP ke Ekuador, Tanggal 26 Agustus – 1 September 2019, dipimpin oleh Juliari P Batubara (F-PDIP)	MP.I TS. 2019-2020
12.	Kunjungan Teknis BKSAP ke Argentina, Tanggal 30 Agustus – 5 September 2019, dipimpin oleh Achmad Farial (F-PPP)	MP.I TS. 2019-2020



No	Kunjungan Kerja Sama Bilateral	Keterangan
13.	Kunjungan Teknis BKSAP ke Eithiopia, Tanggal 14-20 September 2019, dipimpin oleh Surahman Hidayat (F-PKS)	MP.I TS. 2019-2020
14.	Kunjungan Teknis BKSAP ke Ceko, Tanggal 25 – 28 September 2019, dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf (F-PD)	MP.I TS. 2019-2020



Data Pengiriman Delegasi dalam rangka Kerjasama Diplomasi Perorangan Tahun 2019

Masa Persidangan III Tgl. 7 Januari – 3 Maret 2019		
1.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke PNG tgl. 29 Januari - 4 Februari 2019	3 org
2.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Turki tgl. 7 - 13 Februari 2019	1 org
Masa Persidangan IV Tgl. 4 Maret – 7 Mei 2019		
3.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Amerika Serikat tgl. 13 - 19 Maret 2019	5 org
Masa Persidangan V Tgl. 8 Mei – 15 Agustus 2019		
4.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Ceko tgl. 17 - 23 Juni 2019	4 org
5.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Kuba tgl. 23 - 29 Juni 2019	1 org
6.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Ceko tgl. 1 - 7 Juli 2019	16 org
7.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Amerika Serikat tgl. 1 - 7 Juli 2019	1 org
8.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Dalam Rangka Peran Diplomasi ke New Zeland tgl. 5 - 11 Juli 2019	2 org
9.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Swedia tgl. 17 – 23 Juli 2019	8 org
10.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Swiss tgl. 18 – 24 Juli 2019	8 org
11.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke PNG tgl. 21 – 27 Juli 2019	2 org
12.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Inggris tgl. 21 – 27 Juli 2019	1 org
Masa Persidangan I Tgl. 16 Agustus – 30 September 2019		
13.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke PNG tgl. 9 – 15 Agustus 2019	1 org
14.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Inggris tgl. 11 – 17 Agustus 2019	1 org
15.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Swiss tgl. 18 – 24 Agustus 2019	5 org
16.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran	6 org



	Diplomasi ke Kroasia tgl. 18 – 24 Agustus 2019	
17.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke PNG tgl. 18 – 24 Agustus 2019	1 org
18.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Ekuador tgl. 18 – 24 Agustus 2019	1 org
19.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Ceko tgl. 19 – 25 Agustus 2019	2 org
20.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Selandia Baru tgl. 19 – 25 Agustus 2019	1 org
21.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Turki tgl. 21 – 26 Agustus 2019	1 org
22.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Selandia Baru tgl. 21 – 27 Agustus 2019	1 org
23.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Selandia Baru tgl. 23 – 29 Agustus 2019	1 org
24.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke PNG Baru tgl. 25 – 27 Agustus 2019	1 org
25.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Yunani tgl. 25 – 31 Agustus 2019	1 org
26.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Ceko tgl. 25 – 31 Agustus 2019	1 org
27.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Selandia Baru tgl. 1 – 7 September 2019	2 org
28.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Inggris tgl. 1 – 7 September 2019	1 org
29.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Thailand tgl. 7 – 13 September 2019	1 org
30.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Italia tgl. 2 – 8 September 2019	1 org
31.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Maroko tgl. 8 – 14 September 2019	1 org
32.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Australia tgl. 15 – 21 September 2019	1 org
33.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Afrika Selatan tgl. 18 – 24 September 2019	1 org
34.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Malaysia tgl. 19 – 25 September 2019	1 org
35.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Selandia Baru tgl. 18 – 24 September 2019	1 org
36.	Kunjungan Perorangan Anggota DPR RI ke Luar Negeri Dalam Rangka Peran Diplomasi ke Ekuador tgl. 19 – 25 September 2019	1 org
Masa Persidangan I Tgl. 1 Oktober 2019 – 10 Januari 2020		
	-	



DAFTAR KEGIATAN COURTESY CALL & FRIENDLY TALK



Rekapitulasi Dukungan Kegiatan Rapat-rapat Courtesy Call dan Fiendly Talk tahun 2019

MASA PERSIDANGAN III TANGGAL 7 JANUARI 2019 s.d. 13 Februari 2019					
No.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN RAPAT	TEMPAT	
1	Rabu, 9 Januari 2019	Pukul 13.00 WIB	Ketua DPR dan Ketua BKSAP menerima tamu dari Qatar,	Lt. 3 & 4 Nus 3 Ruang Kerja Ketua BKSAP	1
2	Kamis, 10 Januari 2019	pukul 16.15 – 17.30 WIB	Kunjungan <i>Permanent Under Secretary of the Foreign and Commonwealth Office</i> , Mr. Simon McDonald dihadiri anggota-anggota parlemen perempuan sebagai berikut : 1. Ibu Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP) 2. Ibu Ledia Hanifa Amalia (FPKS) 3. Ibu Dr.Ir.Hetifah Syaifudian, MPP (FPG)	Lt. 4 Nus 3 Ruang Kerja Ketua BKSAP	2
3	Kamis, 24 Januari 2019	Pukul 14.00 WIB	Tamu Parliament Pakistan diterima Deputi Persidangan	Lt. 2 Nus 3	3
4	Kamis, 7 Februari 2019	Pukul 09.00 WIB	Karo KSAP menerima Wakil Dubes Nowergia, Mr. Bjornar Hotvedt	Lt. 4 Nus 3	4
5	Kamis, 7 Februari 2019	Pukul 10.00 WIB	Wakil Ketua DPR/ Korpolkam menerima Tamu Deputy Political Counselor Kedutaan AS, Steven Watson	Lt. 3 Nus 3	5
6	Rabu, 27 Februari 2019		Komisi I dan AIPA menerima Mrs. Renate Kunast (Head of Delegation, Member of the German Bundestag, Chairwoman of the Parliamentary Friendship Group)	Ruang Rapat Komisi I	6
MASA PERSIDANGAN IV TANGGAL 4 MARET 2019 s.d. 28 Maret 2019					
7.	Selasa, 5 Maret 2019	Pukul 10.30 WIB	Wakil Ketua DPR RI/Korkesra didampingi Anggota BKSAP Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno, Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana, dan Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menerima kunjungan kehormatan Norwegian Parliament Delegation to the Asia – Europe Parliament Partnership (ASEP) yang dipimpin oleh H.E. MS. Elin Rodum Agdestien ke Gedung DPR RI.	Lantai 2 Nus. 3	7



8.	Senin, 25 Maret 2019	Pukul 11.00 WIB	Kapuslit (Indra Pahlevi) beserta jajarannya menerima Delegasi Partai Buruh Australia Ms. Georgia Philips (Ministerial Adviser to Meegan Fitzharris MLA)	Lantai 2 Gedung Nusantara 3	8
9	Kamis, 28 Maret 2019	12.00	Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) yang juga Anggota Komisi I, Dave Laksono menerima kunjungan ketua friendship group new zealand parliament - south and south east asia parliaments	Nusantara III lantai 3	9
MASA PERSIDANGAN V TANGGAL 8 Mei 2019 s.d. 26 Juli 2019					
10.	Rabu, 8 Mei 2019	13.00	Wakil Ketua DPR/ Korpolkam didampingi Wakil Ketua BKSAP Dave Akbarshah menerima Duta Besar Peru	Nusantara III lt.2	10
11.	Kamis, 9 Mei 2019	10.00	Wakil Ketua BKSAP, Dave Akbarshah didampingi Delegasi Kunjungan Teknis BKSAP ke Kuba menerima Dubes Kuba	Nusantara III lt.2	11
12	Selasa, 14 Mei 2019		Komisi VII menerima Delegasi RRT Mr. Wu Yucai (Head Delegation, Vice Chairman Standing Committe of Ningxia People's Congres)	Nusantara III lantai 2	12
13.	Jum'at, 17 Mei 2019	10.00	Wakil Ketua DPR/Korpolkam didampingi Bp. Hamdani, Anggota GKSB Korsel menerima kunjungan Delegasi parlemen Korsel yg dipimpin oleh Mr. Lee, Seok Hyun	Nusantara III lt.2	13
14.	Rabu, 29 Mei 2019	11.00	Wakil Ketua DPR/Korpolkam didampingi Bp. Supratman Agtas (Ketua GKSB Kosta Rika) menerima Dubes Kosta Rika utk Indonesia HE. Mr. Esteban Quiros Salazar	Nusantara III lt.2	14
15.	Senin, 21 Juni 2019	10.00	Wakil Ketua DPR RI Drs. Utut Adianto/Koordinator Bidang BAKN dan BURT menerima Y.M. Ji Bingxuan (Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) RRT merangkap ketua CAFIU	Gedung Nusantara III lantai 2	15
16.	Senin, 24 Juni 2019	10.00	Ketua BKSAP menerima Duta Besar Iran	Nusantara III Lt. 4 RR. Ketua BKSAP	16
17.	Jumat, 5 Juli 2019		Pimpinan Parlemen Tinggi Libya (Chairman of Libyan Supreme Council)	Nusantara 1	17



			H.E. Khalid Al Mishri di terima Ketua DPR RI didampingi Komisi I dan Komisi IX		
18.	Senin, 8 Juli 2019	14.00	Sekjen DPR RI menerima Staf Brigadier Ishaq M.S. Al Beshr (Atase Militer Kedubes UEA)	Lantai 2 Gedung Setjen	18
19.	Rabu, 10 Juli 2019	13.00	Farewell Call Dubes Iran kepada Ketua DPR RI	Nusantara 3 lantai 2	19
20.	Jumat, 12 Juli 2019		Kepala Biro KSAP menerima Kedutaan Amerika Serikat	Ruang Kerja Biro KSAP	20
21.	Jumat, 19 Juli 2019		Wakil Ketua DPR RI menerima Menteri Luar Negeri Latvia Mr. Edgars Rinkericis didampingi Komisi I dan Dubes Indonesia merangkap Latvia R. Bagas Hapsono.	Nusantara III lantai 3	21
22.	Rabu, 31 Juli 2019	14.30	Ketua DPR RI menerima tamu Kongres Amerika Serikat David Price (Chairman of House Democracy Partnership/HDP)	Nusantara III lantai 3	22

**MASA PERSIDANGAN I
TANGGAL 16 Agustus 2019 s.d. 30 September 2019**

23.	Senin, 12 Agustus 2019		Biro KSAP Rapat dengan Kementerian Luar Negeri Dir. Eropa tentang tamu Inggris (Richard Graham).	Ruang Rapat BKSAP Nus. III lantai 4	23
24.	Senin, 19 Agustus 2019	11.15	Wakil Ketua Dr. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc/Bidang KORPOLKAM menerima Delegasi APPGI, London All Party Parliamentary Group on Indonesia)	Nusantara III lantai 2	24
25.	Selasa, 20 Agustus 2019		Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc/Bidang KORPOLKAM menerima Dubes Irak	Nusantara III lantai 3	25
26.	Selasa, 27 Agustus 2019	14.00	Wakil Ketua Drs. Utut Adianto/Koordinator Bidang BAKN dan BURT menerima Delegasi Republik Iran H.E. Mr. Allahyaar Malekshahi (the chairman of legal and judicial commision)	Nusantara III lantai 2	26
27.	Kamis, 29 Agustus 2019		Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc/Bidang KORPOLKAM menerima Dubes Pakistan	Nusantara III lantai 3	27

**MASA PERSIDANGAN I
TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 s.d. 17 DESEMBER 2019**

1	Rabu, 23 Oktober 2019	Pukul 13.00 WIB	<i>Friendly Talk</i> Wakil Ketua DPR/Korpolkam DR. H.M. Azis Syamsudin, SH., SE.,MAF., MH didampingi oleh Charles Honoris (F.PDI - P) dan Nurul Arifin (F.PG)	Ruang Wakil Ketua Bidang Korpolkam Ged. Nus. III lt.3	28
---	-----------------------	-----------------	---	---	----



			menerima Parlemen Polandia, Mr. Bartosz Jozef Kownacki (Anggota Grup Kerjasama Bilateral Polandia-Indonesia)		
2	Rabu, 23 Oktober 2019	Pukul 14.00 WIB	Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerima Mr. Stefan Burkhardt (Kepala Divisi untuk kerjasama Asia Selatan dan Asia Tenggara, <i>Hanns Seidel Foundation (HSF)</i>)	Nus. 3 Lt. 2	29
3	Senin, 28 Oktober 2019	Pukul 17.00 WIB	Friendly Talk Ketua DPR RI menerima Delegasi Maroko, H.E. Mr. Nasser Bourita (Menlu Kerajaan Maroko) didampingi oleh H.E.Mr.quadia Benabdellah (Duta Besar Kerajaan Maroko di Jakarta)	Lt.3 Nus 3	30
4	Selasa, 19 Nov 2019	Pukul 08.30 WIB	Ketua BKSAP DR. H. Fadli Zon, S.S.,M.Sc didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma dan Ir. H. A. Hafisz Tohir menerima Ketua Parlemen Singapura H.E. Mr. Tan Chuan Jin.	Hotel Kempinski	31
5.	Selasa, 19 Nov 2019	Pukul 10.00 WIB	Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Dr. Azis Syamsudin menerima Parlemen Selandia Baru Hon. Kanwaljit Singh didampingi Tantowi Yahya (Indonesia Ambassador to New Zealand Samoa and Tonga) dan Dr. Jonathan Austin (New Zealand Ambassador to Indonesia)	Lt. 3 Nus III	32
6.	Rabu,20 November 2019	Pukul 12.00 WIB	DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc/ Ketua BKSAP menerima H.E Mr. Kim Chang-beom (Dubes Korsel)	Lt 2, Nusantara III	33
7.	Rabu, 20 November 2019	pkl. 13.00. Wib	DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc/ Ketua BKSAP, H.E. Mr. Volodymyr Pakhil (Dubes Ukraina untuk Indonesia)	Lt 2, Nusantara III	34
8.	Selasa, 26 November 2019	Pkl. 13.00. Wib	DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc/ Ketua BKSAP, menerima H.E. Mr. Petar Dimitrov Andonov (Dubes Bulgaria untuk Indonesia)	Lt 2, Nusantara III	35
9	Selasa, 26 November 2019	Pukul 15.00 WIB	Rapat Koordinasi BKSAP dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar beserta jajarannya.	Lt 2, Nusantara III	36
10	Rabu, 27 November 2019	Pukul. 15.30 WIB	Anggota BKSAP Sondang Tiar Debora Tampubolon/A-158/FPDIP, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos.,M.Si/A-78/Gerindra, Luluk Nurhamidah, M.Si A-20/FPKB, H. Iskan Qolba Lubis, M.A./A-413/FPKS menerima delegasi Women Afghanistan yang dipimpin oleh Hasina Mukhles (Director Ministry of Women Afganistan didampingi Dubes RI untuk Afganistan	Lt 2, Nusantara III	37



			H.E. Dr. Arief Rachman.		
11	Kamis, 28 November 2019	-	Rencana akan berkunjung ke Indonesia, tanggal, 28 November 2019 H.E. Mr. Sergey Zhigarev (Chairman of the Committee on Economic Policy, Industry, Innovative Development and Entrepreneurship of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) Ditunda.	-	
12	Selasa, 3 Desember 2019	pkl. 13.30. WIB	DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc/ Ketua BKSAP menerima H.E. Mohammad Khoush Heikal Azad (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran)	Lt. 2 Nus III	38
13	Selasa, 3 Desember 2019	pkl. 15.00. WIB	Dr. Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR RI/ Bidang Korpolkam), Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc/Ketua BKSAP, Charles Honoris/A-162/F.PDI-P, Mr. Raphael Gerard (Ketua kelompok persahabatan Perancis-Indonesia)	Lt 2, Nus III	39
14	Rabu, 4 Desember 2019	pkl. 11.00. WIB	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng./A-422/FPKS menerima H.E. Professor Admasu Tsegaye (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to Indonesia)	Lt 2, Nus III	40
15	Kamis, 5 Desember 2019	Pkl. 11.00 WIB	Putu Supadma Rudana/Wakil Ketua BKSAP/ A-563 menerima Delegasi Parlemen Tiongkok yang dipimpin oleh H.E. Mrs. Li Kang (Member of the Standing Committee of NPC, Deputy Chairman of the Ethnic Affairs Committee of NPC)/RRT.	Lt 2, Nus III	41
16	Kamis, 5 Desember 2019	pkl. 11.30 WIB	DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc/ Ketua BKSAP BKSAP menerima H.E. Fabian Valdivieso (Dubes Ekuador untuk Indonesia)	Lt 2, Nus III	42
17	Kamis, 5 Desember 2019	pkl. 14.00 WIB	H.E. Dr. Hussam bin Abdulmohsen (Presiden General Auditing Bureau of the Kingdom of Saudi Arabia). Rencana akan diterima Pak Dasco lanjut tour building BATAL	Lt 2, Nus III	
18	Jumat, 6 Desember 2019	Pkl. 10.00 WIB	DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc/ Ketua BKSAP BKSAP menerima Wakil Menteri Transportasi Malaysia, Dato Kamaruddin Jafar.	Gedung Perpustakaan Fadli Zon	43



LAPORAN TIM ZI BIRO KSAP

Progress Report as of 29/01/2020

MENUJU ZONA INTEGRITAS

**WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)**

BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

SK SEKJEN DPR-RI PENETAPAN UNIT KERJA

- Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Biro KSAP Sekjen DPR-RI 2019, yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2019
- Menunggu SK penetapan 2020



BKSAP



kaleidoskop

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2014 - 2019

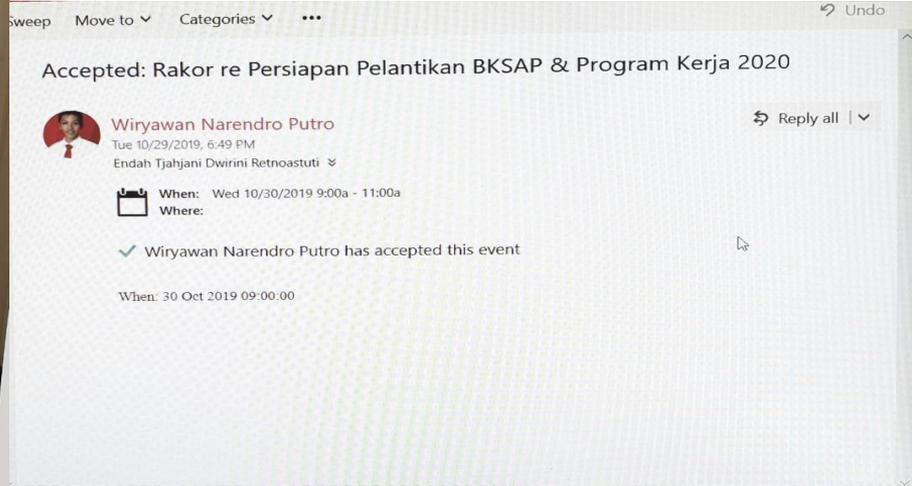
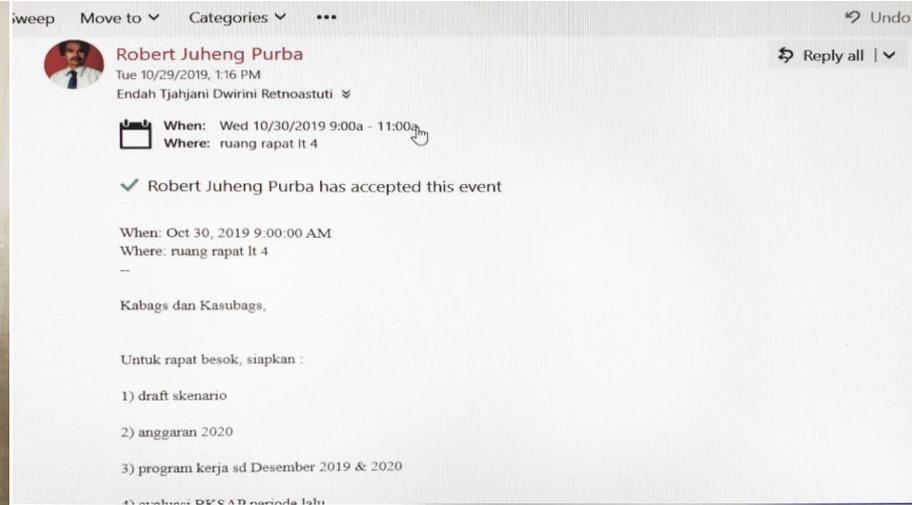


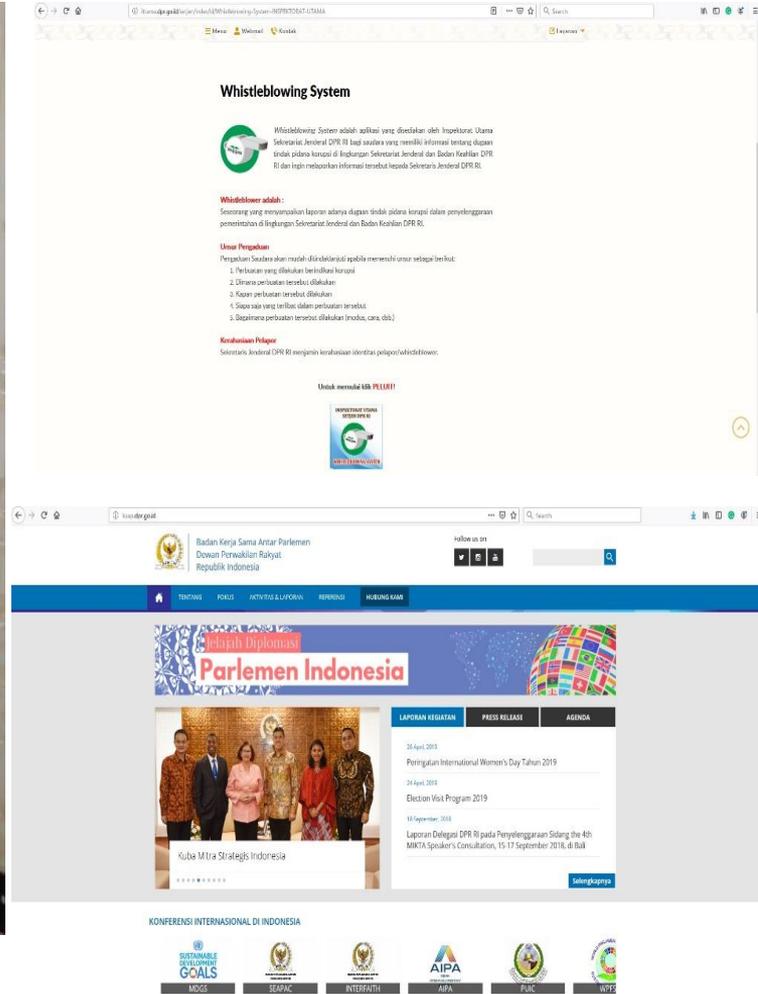
Diterbitkan oleh:
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Contoh rapat-rapat Tim Zona Integrasi BKSAP



Evidences





ACTION PLAN

Manajemen Perubahan

Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran



Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat



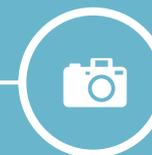
Penataan Tata Laksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance



Penataan Sistem Manajemen SDM

SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera



Penguatan Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme



HAL-HAL YANG MENDUKUNG

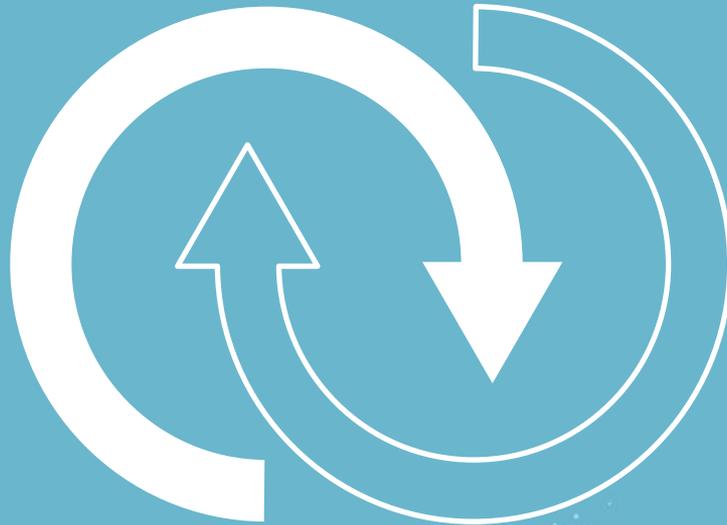
Komitmen
dari Pejabat
dan Staf di
lingkungan
Biro KSAP

Dukungan dari
Pimpinan BKSAP
dan Sekretariat
Jenderal DPR-RI

Lingkungan
yang
menunjang
pencapaian
Zona
Integritas
(Adanya Open
Parliament
dan
GOPAC)

KENDALA

Pengumpulan
Evidence
Tergantung
respon unit-unit
kerja lain



Panduan secara
rinci
untuk dapat
memperoleh
predikat Zona
Integritas

REKOMENDASI TIM YANG SUDAH DISELESAIKAN



Menyelesaikan revisi SOP di lingkungan Biro KSAP



Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Biro KSAP



Membuat SOP pelayanan di lingkungan Biro KSAP



Menyelesaikan tindak lanjut temuan dari BPK atau inspektorat utama yang terdapat di lingkungan Biro KSAP



Menyelesaikan survey kepuasan untuk anggota BKSAP

REKOMENDASI

Untuk dapat mencapai dan menjadikan Biro KSAP sebagai Zona Integritas, WB/WBBM, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut



Melakukan *benchmarking* ke kementerian/lembaga yang telah lulus kriteria ZI/WBK/WBBM



Membuat serangkaian inovasi-inovasi di lingkungan biro KSAP untuk



Optimalisasi pelayanan ke Pimpinan dan Anggota BKSAP dan juga DPR-RI



Merevisi / *update* SOP-SOP yang sudah ada



Membuat SOP-SOP yang dibutuhkan



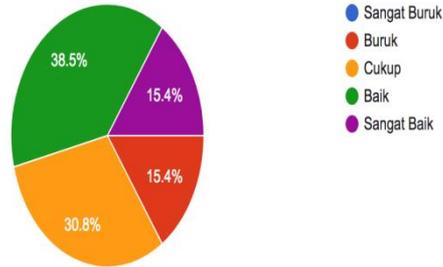
Melakukan survey kepuasan Anggota BKSAP serta menindaklanjutinya

SURVEY KEPUASAN PADA RAPAT PLENO BKSAP 23/01/2020

1.

Bagaimana Tingkat Kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas pelayanan informasi yang diberikan oleh Sekretariat BKSAP?

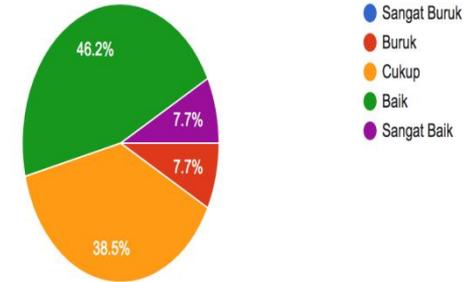
13 responses



2.

Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI terhadap kualitas pelayanan rapat-rapat yang disiapkan oleh Sekretariat BKSAP?

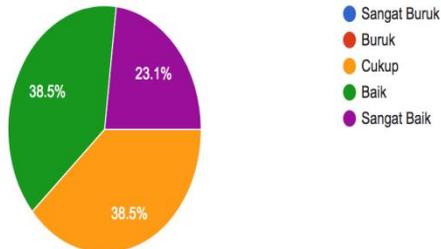
13 responses



3.

Bagaimana Tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas Jamuan rapat yang disajikan oleh Sekretariat BKSAP?

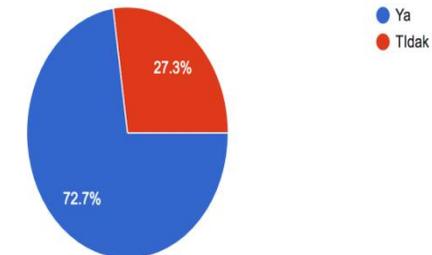
13 responses



4.

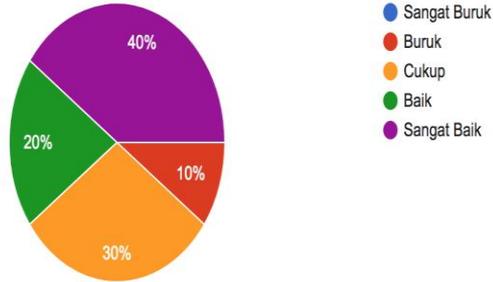
Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kunjungan dengan BKSAP? apabila tidak, silahkan melanjutkan ke pertanyaan No. 7 (pertanyaan terakhir)

11 responses



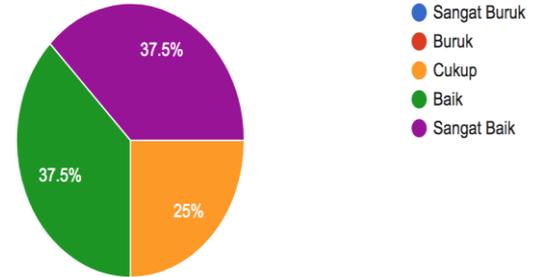
5. Bagi Bapak/Ibu yang pernah melakukan kunjungan BKSAP, bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas materi/substansi yang dibuat dan digunakan pada saat pendampingan Delegasi pada saat sidang/kunjungan ke luar negeri maupun dalam negeri?

10 responses



6. Bagi Bapak/Ibu yang pernah melakukan kunjungan BKSAP, bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu atas pelayanan teknis dalam pendampingan Delegasi pada sidang/kunjungan ke luar negeri maupun dalam negeri?

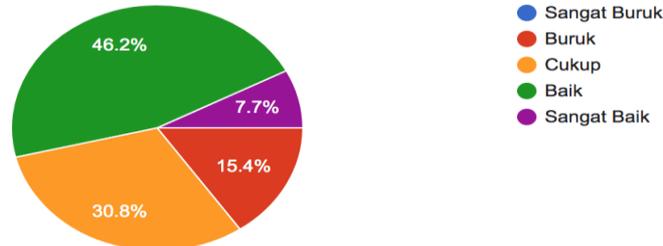
8 responses



7.

Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas peliputan kegiatan-kegiatan BKSAP di Website atau media sosial lainnya?

13 responses



KEDEPAN

'WOW FACTOR'

- Dukungan atas diadopsinya sebuah resolusi di pertemuan international, dan dimanfaatkan.
- MOU dengan parlemen negara lain.



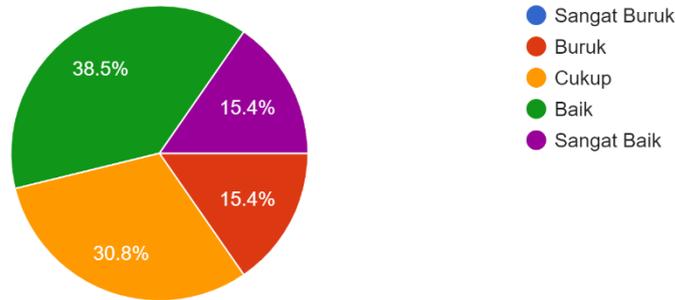
thank
YOU



HASIL SURVEY INTERNAL BIRO KSAP

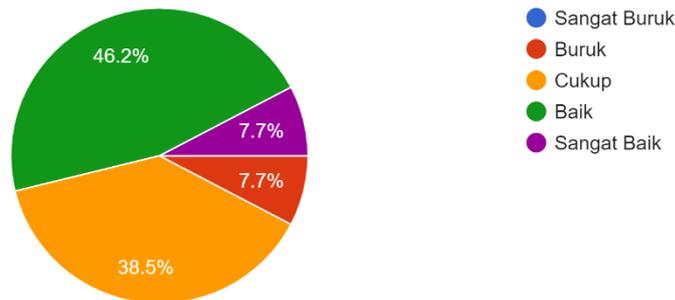
Bagaimana Tingkat Kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas pelayanan informasi yang diberikan oleh Sekretariat BKSAP?

13 responses



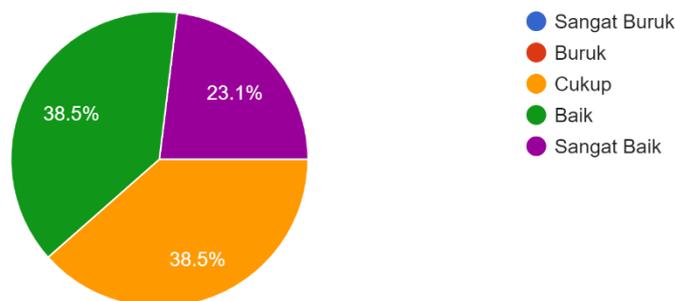
Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI terhadap kualitas pelayanan rapat-rapat yang disiapkan oleh Sekretariat BKSAP?

13 responses



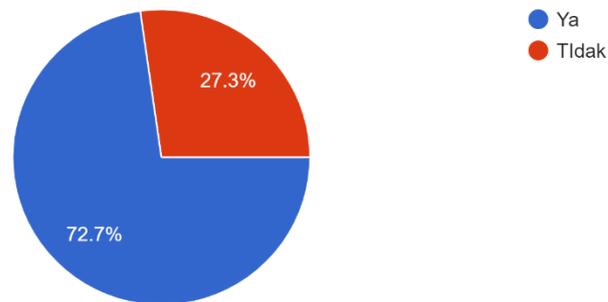
Bagaimana Tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas Jamuan rapat yang disajikan oleh Sekretariat BKSAP?

13 responses



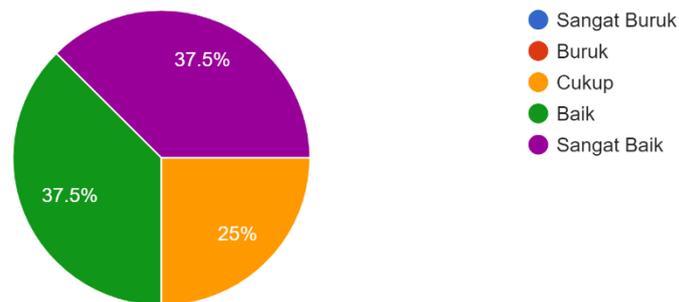
Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kunjungan dengan BKSAP? apabila tidak, silahkan melanjutkan ke pertanyaan No. 7 (pertanyaan terakhir)

11 responses



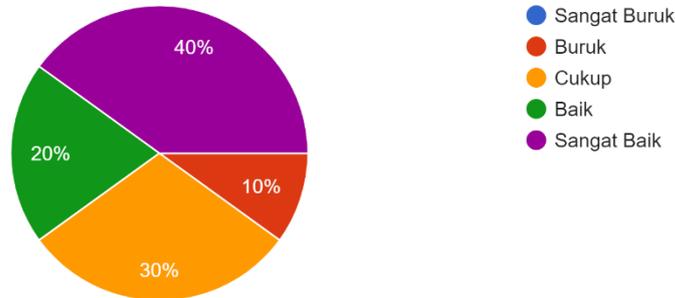
Bagi Bapak/Ibu yang pernah melakukan kunjungan BKSAP, bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu atas pelayanan teknis dalam pendampingan Delega.../kunjungan ke luar negeri maupun dalam negeri?

8 responses



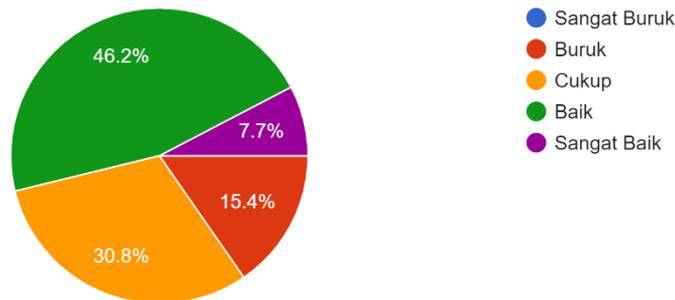
Bagi Bapak/Ibu yang pernah melakukan kunjungan BKSAP, bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas materi/substansi yang dibuat...g/kunjungan ke luar negeri maupun dalam negeri?

10 responses



Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu Anggota DPR RI atas peliputan kegiatan-kegiatan BKSAP di Website atau media sosial lainnya?

13 responses



Mohon apabila Bapak/Ibu ada saran atau masukan lainnya : 8 responses

Lebih di tingkatkan dan lebih baik lagi kedepannya
Abang lihat sudah beberapa bulan feskub/fanspage BKSAP sudah beberapa bulan tidak diupdate.
Mohon informasi terkait kegiatan" BKSAP dapat disampaikan dengan cepat dan baik. well informed
Mohon dibuat grup BKSAP
Hendaknya semua kegiatan well inform(transparan) untuk semua anggota. Kita siap mendukung yang penting transparan dan akuntable. Prinsip kebersamaan dan keadilan hendaknya diutamakan
Tingkatkan terus peran BKSAP dalam Diplomasi Parlemen Indonesia
Tingkatkan kinerja
Lebih di perbanyak agendanya

Nama responden/email responses

Ema Umiyyatul Chusnah/ emaumiyyatulchusnah.dprri@gmail.com

H. Andi Achmad Dara, SE

DR.KH.Surahman Hidayat. MA

andimramly@gmail.com

DIDI IRAWADI/ didi.irawadi2@gmail.com

Andi Yuliani Paris

psr.dprri@gmail.com

Mardani Ali Sera/ wasekjen@gmail.com

rifanrachman@gmail.com

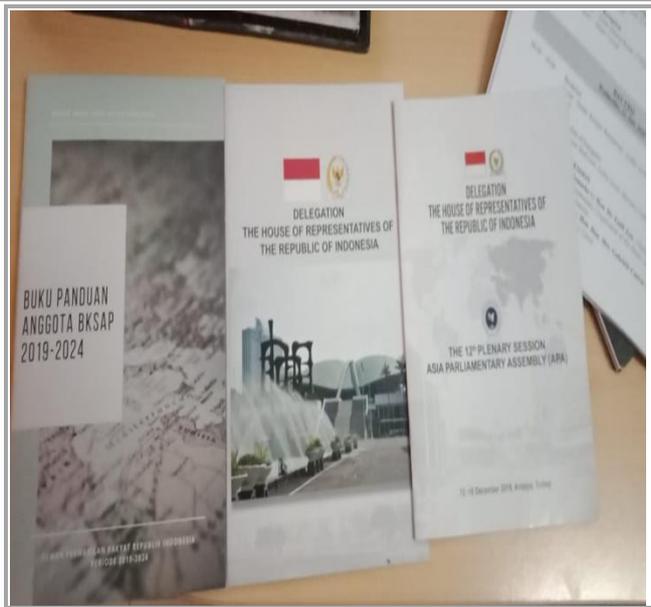


FOTO *OUTPUT DOCUMENT*



DRAFT OUTPUT DOCUMENT YANG DISIAPKAN BIRO KSAP TAHUN 2019









LAPORAN KINERJA

2019

BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**